

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri dalam skala kecil dan dikelola atau dijalankan oleh seorang individu, badan atau sekelompok masyarakat. UMKM di Indonesia sudah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian yang ada di Indonesia, UMKM memiliki keunggulan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Zantika, 2019).

UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Negara, karena memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah UMKM dan penyerapan tenaga kerja yang mengalami peningkatan setiap tahun sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2016 sektor UMKM mendominasi 99,9% unit bisnis di Indonesia dan mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro yang paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87% dan usaha besar hanya dapat menyerap 3,3% (Zantika, 2019).

Keberadaan UMKM diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya dapat

mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah setiap tahunnya, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki ekonomi masyarakat (Hanifah, 2019).

Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan industri merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di era sekarang ini. Salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman sektor industri adalah Kabupaten Ponorogo. Mulai dari kerajinan reog, kerajinan alat dapur, berbagai pernak-pernik, meubel, bahan bangunan, hingga makanan khas Ponorogo. Hampir setiap Kecamatan di Ponorogo memiliki sentra UMKM yang menghasilkan jenis produk tertentu setiap daerahnya. Selain sentra-sentra industri besar, banyak industri kecil yang tersebar di wilayah Ponorogo (Hanifah, 2019).

Dalam proses perkembangan usaha, pelaku UMKM sering mengalami hambatan atau masalah terutama pada bagian pendanaan. Kurangnya jumlah dana ini mengharuskan pelaku UMKM untuk melibatkan pihak ketiga seperti Bank dan sejenisnya agar memperoleh dana tambahan. Ketika akan melibatkan pihak ketiga, para pelaku UMKM harus memenuhi syarat berupa adanya laporan keuangan dari usaha yang dijalankan tersebut. Masih adanya UMKM yang belum memiliki laporan keuangan membuat UMKM kesulitan untuk mengajukan kredit kepada pihak bank. (Azmi dan Annisa, 2018).

Pelaku UMKM yang paham dan memiliki laporan keuangan sangat sedikit bahkan tidak sampai 10%. Semakin banyak dan rumit suatu kegiatan

operasional perusahaan maka penyusunan laporan keuangan semakin penting untuk diterapkan. Hasil dari penyusunan laporan keuangan akan digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan dari usaha. Untuk itu pengelolaan keuangan membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan transparan (Sinarwati 2014).

Terkait dengan keterbatasan UMKM dalam membuat laporan keuangan, untuk mempermudah pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan SAK EMKM. Dengan adanya SAK EMKM maka sangat diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha (Zantika, 2019).

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 24 Oktober 2016 merupakan bukti nyata dukungan terhadap UMKM Indonesia. Sebelumnya, DSAK IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada tahun 2009 yang dikhususkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun seiring dengan perkembangan, dibutuhkan standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP yang dirasa masih sulit untuk diterapkan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan adanya SAK EMKM ini diharapkan mampu menjadi pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia serta mampu

memperluas akses pembiayaannya sehingga persepsi pengusaha UMKM akan pentingnya pembuatan laporan keuangan juga semakin meningkat (Silvia dan Azmi, 2019).

Di Kabupaten Ponorogo memiliki lebih dari 6000 UMKM yang tercatat di Dinas Perdagangan dan UMKM, dan 131 diantaranya adalah UMKM sektor industri. Hal ini seharusnya menjadi potensi yang besar bagi daerah yang mana UMKM ini memiliki peran yang besar bagi perekonomian daerah, bagi salah satu pembuka pekerjaan, serta bisa mengentaskan kemiskinan. Salah satu kunci berkembangnya suatu usaha adalah dengan memahami kondisi keuangan usaha tersebut. Di Kabupaten Ponorogo ini masih sangat banyak pelaku UMKM yang tidak menggunakan akuntansi, antara lain akuntansi dianggap sesuatu yang sulit dan tidak penting, mereka menganggap bahwa tanpa akuntansi usaha tetap berjalan dan selalu memperoleh laba. Selain itu, sebagian besar UMKM di Ponorogo hanya mencatat informasi akuntansi secara sederhana yaitu kas masuk dan kas keluar dimana pencatatan tersebut menjadi satu antara keuangan untuk keperluan usaha dan untuk keperluan pribadi. Padahal menurut data dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo, banyak UMKM yang memiliki kekayaan ratusan juta hingga milyaran rupiah, hal ini seharusnya menjadikan para pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk menyusun laporan keuangan guna mengetahui perputaran keuangan dalam usaha. Laporan keuangan saat ini juga menjadi salah satu syarat mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan terutama bank. Keterbatasan pada pelaku usaha menyebabkan adanya kesulitan untuk

menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang persepsi pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM antara lain dilakukan oleh Fany Nurhidayanti (2019) yang menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari Annies Zantika (2019) yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Sedangkan menurut penelitian dari Viola Syukrina (2018) menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Hal ini mengakibatkan para pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usahanya baik dari finansial maupun dari kondisi usaha. Permasalahan yang terjadi ini yang menjadi kunci adalah pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, maka penelitian ini mengambil judul **PENGARUH PERSEPSI PELAKU UMKM, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN UMUR USAHA TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM (STUDI PADA UMKM INDUSTRI SE-KABUPATEN PONOROGO).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis menulis perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM?
- 2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM?
- 3) Apakah umur usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM?
- 4) Apakah persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan, dan umur usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, untuk:

- a. Mengetahui pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM
- b. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM
- c. Mengetahui pengaruh umur usaha terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM
- d. Mengetahui pengaruh persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan, dan umur usaha terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

c. Bagi DSAK IAI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK IAI) untuk melihat apa yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

d. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai motivasi serta informasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada pembahasan yang berkaitan dengan UMKM.